

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Keuangan Inklusif.**

Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan eksklusif. Keuangan eksklusif (Leyshon dalam Ummah dkk., 2015) adalah suatu metode yang menghalangi kelompok individu atau sosial dari mendapatkan akses tentang sistem keuangan formal. Menurut Erupean Commision (2008) keuangan eksklusif didefinisikan sebagai proses orang menghadapi kesulitan dalam menggunakan atau mengakses jasa keuangan. Berbagai peneliti mendefinisikan keuangan inklusif sebagai kebalikan dari keuangan eksklusif.

Menurut Chithra dan Selvam (2013) keuangan inklusi adalah proses untuk masyarakat miskin dan tertinggal masuk ke dalam sistem keuangan yang terorganisir. Keuangan inklusi juga dijelaskan sebagai penyedia akses bagi masyarakat miskin dan tertinggal untuk dapat menggunakan layanan sistem keuangan.

Keuangan inklusi (Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2013) adalah penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa adanya halangan baik yang bersifat harga maupun non harga dalam penggunaannya. Sarma (2012) menjelaskan keuangan inklusi adalah proses dalam menjamin kemudahan terhadap akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi

seluruh perilaku ekonomi. Bank Indonesia (2014) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai seluruh upaya yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang bersifat non harga maupun harga, terhadap akses masyarakat dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan.

## 2. Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif.

Visi keuangan inklusif dirumuskan untuk menjadikan sistem keuangan yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Tujuan keuangan inklusif dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.
- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat

pengetahuan keuangan yang masih rendah.

- d. Meningkatkan akses masyarakat ke dalam layanan keuangan. Hambatan yang di hadapi oleh masyarakat miskin dalam mengakses layanan keuangan biasanya berupa masalah kendala administrasi dan keadaan geografis. Menyelesaikan permasalahan ini akan membuat terobosan dalam akses ke jasa keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara lembaga perbankan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non-bank. Pemerintah dapat menjamin tidak hanya pemberdayaan terhadap kantor cabang, tetapi juga terhadap peraturan yang ada untuk memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. oleh karena itu, sinergi antara lembaga perbankan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non-bank menjadi penting dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
- f. Memaksimalkan peran dari teknologi informasi dan komunikasi dalam memperluas cakupan layanan keuangan. Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan dapat memperluas sistem keuangan formal lebih dari sekedar layanan kredit dan tabungan. Namun peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan antara perluasan jangkauan dan resiko.

### 3. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif.

Keuangan inklusif adalah strategi pembangunan nasional yang digunakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas sistem keuangan, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Strategi ini

berpusat pada masyarakat sehingga perlu menyoroti kelompok maupun masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan.

Pengelompokan tersebut meliputi :

a. Miskin Berpendapatan Rendah.

Pada kategori miskin berpendapatan rendah ini, termasuk mereka yang memiliki akses tapi terbatas ataupun mereka yang sama sekali tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Kelompok ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

b. Miskin Berkerja.

Kelompok ini termasuk orang miskin yang berusaha sendiri, mencakup petani kecil dan marjinal, nelayan, seninam dan pengrajin, pedagang kecil, serta pengusaha mikro di sektor informal.

c. Bukan Miskin.

Dalam kategori bukan miskin ini meliputi penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam kriteria miskin berpendapatan rendah ataupun miskin bekerja.

d. Pekerja Migran Domestik dan Internasional.

TKI biasanya mempunyai akses yang terbatas dalam layanan keuangan. TKI membutuhkan sarana dalam pengiriman uang dari tempat mereka bekerja ke rumah, yang sering kali terletak pada daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan. Mereka memiliki akses yang

terbatas ke produk atau jasa keuangan formal.

e. Perempuan .

Di sebagian besar negara berkembang, ada perbedaan yang besar antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, kebutuhan, dan dalam pilihan mereka terhadap jasa keuangan, sehingga dalam menciptakan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan.

f. Penduduk Daerah Terpencil.

Menurut Bank Indonesia (2014) sekitar 52 persen masyarakat di Indonesia hidup pada daerah desa dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 11,30 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

**TABEL 2.1.**

## Karakteristik Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif

Kapabilitas Keuangan	Sasaran		
	Miskin Berpendapatan Rendah	Miskin Bekerja/ Miskin Produktif	Hampir Miskin
Kemampuan menabung	Tidak memiliki kemampuan menabung sama sekali/ sangat kecil tanpa akses ke layanan tabungan	Memiliki kemampuan menabung sebagian dari pendapatan, tetapi kebanyakan menabung secara informal	Memiliki kemampuan menabung dan akses ke bank formal
Akses ke kredit	Tidak dapat Melunasi	Memiliki akses ke kredit informal. Mampu melunasi kredit, tetapi tidak memiliki jaminan yang dapat diterima bank	Memiliki akses ke beberapa sumber formal dan informal. Mampu melunasi kredit dan memiliki barang jaminan
Kebutuhan Asuransi	Sangat rentan terhadap guncangan (ekonomi) pribadi dan masyarakat	Memiliki beberapa penyangga, tetapi tetap bisa sangat berpengaruh terhadap guncangan	Memiliki beragam instrument untuk menghadapi resiko
Kebutuhan pengiriman uang	Menerima remitansi dari anggota keluarga yang menjadi pekerja migrant	Memerlukan remitansi serta kemungkinan pengiriman uang melalui ponsel	Mungkin perlu melakukan pengiriman melalui bank, membayar tagihan, dll
Melek Keuangan	Tidak ada	Sedang	Sedang
Identitas Keuangan	Tidak ada	Terbatas	Terbatas

Sumber: Booklet Keuangan Inklusif 2014

#### 4. Indikator Keuangan Inklusif.

World Bank (2009) menjelaskan bahwa akses jasa keuangan dapat diukur dengan jumlah individu, rumah tangga, maupun perusahaan yang menggunakan layanan keuangan seperti menyimpan, menerima kredit, melakukan pembayaran, dan menggunakan produk keuangan lainnya dari

berbagai lembaga keuangan baik yang formal maupun yang informal. Indikator yang paling baik untuk mengukur akses jasa keuangan adalah jumlah orang yang menggunakan jasa simpanan dan jumlah orang yang menggunakan jasa pinjaman di lembaga keuangan. Namun, tidak semua negara yang memiliki data tersebut, terutama dari lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan informal. Indikator yang paling tepat digunakan untuk mengukur akses terhadap penggunaan jasa simpanan adalah jumlah rekening deposit per 1000 orang dewasa.

Beberapa penelitian telah membedakan antara konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa keuangan diukur dengan jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar di suatu wilayah, sedangkan penggunaan diukur dengan jumlah deposit dan kredit yang disalurkan (World Bank, 2009).

#### 5. Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif.

Untuk mengukur keuangan inklusif dengan menghitung proporsi dari populasi dewasa atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal diperlukan adanya Indeks Keuangan Inklusif. Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif yang dikembangkan oleh Sarma (2012) terbagi atas tiga dimensi yaitu:

##### a. Dimensi Penetrasi Perbankan.

Dimensi penetrasi perbankan merupakan indikator dalam keuangan inklusif. Semakin banyak penggunaannya maka akan semakin baik keuangan inklusif, oleh karena itu sistem keuangan diharapkan

mampu menjangkau secara menyeluruh di penggunanya. Salah satu yang menjadi indikator dalam penetrasi perbankan adalah proporsi populasi yang memiliki rekening di bank.

b. Dimensi Ketersediaan Jasa Perbankan.

Dimensi ketersediaan jasa keuangan ini menjelaskan tentang sejauh mana industri perbankan mampu menjangkau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Apabila industri perbankan mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas, maka masyarakat akan mudah untuk mengenal dan memanfaatkan produk perbankan, sehingga jelas hal ini dapat berdampak pada perilaku keuangan personal masyarakat tersebut. Ketersediaan layanan dapat ditunjukkan dengan jumlah kantor cabang bank (per 1000 penduduk) dan / atau dengan nomor ATM per 1000 orang, atau jumlah karyawan bank per pelanggan.

c. Dimensi Penggunaan Jasa Perbankan.

Untuk indikator penggunaan jasa perbankan ini menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat mampu menggunakan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomian. Hal ini dapat menjelaskan perilaku masyarakat dalam mengelola finansial di dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk perbankan tersebut.

6. Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Inklusif.

Penelitian Evans (2018) meneliti tentang bagaimana hubungan internet dan telepon terhadap keuangan inklusif di Africa. berdasarkan data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016. Dari hasil perhitungan, dapat

disimpulkan internet dan ponsel memiliki hubungan positif yang signifikan dengan keuangan inklusif di Africa. Persamaan umum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana  $X_1, X_2, X_n$  adalah variabel bebas dan  $\varepsilon$  adalah *error term*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat internet dapat mempengaruhi keuangan inklusif. Hal ini menyiratkan bahwa penambahan pengguna internet memainkan peran penting dalam peningkatan keuangan inklusi. Dalam hal yang sama telepon juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif. Hal ini berarti daerah dengan jumlah telepon yang tinggi memiliki tingkat keuangan inklusi yang lebih tinggi. Semakin bertambahnya jumlah pengguna telepon memainkan peran penting dalam peningkatan keuangan inklusif.

Penelitian yang dilakukan Chithra dan Selvam (2013) mengenai faktor yang mempengaruhi di India mengungkapkan bahwa faktor sosial-ekonomi seperti pendapatan, literasi keuangan dan penduduk desa ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keuangan inklusif. Infrastruktur jalan, telepon, komputer dan internet juga berhubungan signifikan dengan keuangan inklusif. Di antara variabel perbankan deposit dan kredit ditemukan hubungan yang signifikan dengan keuangan inklusif. Namun, pengangguran, koran, dan rasio Kredit-deposito tidak signifikan terkait dengan keuangan inklusif.

Penelitian yang dilakukan Ummah dkk., (2015) mengenai keuangan inklusif dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Tingkat keuangan inklusif di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ukuran perekonomian, distribusi pendapatan yang digambarkan dengan indeks gini, pengguna telepon seluler dan pengguna internet. Sementara rasio panjang jalan dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat keuangan inklusif.

Penelitian ini menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IIK) sebagai variabel dependen. Indeks keuangan inklusif merupakan ukuran untuk tingkat keuangan inklusif. Indeks keuangan inklusif akan dipergunakan untuk mengukur tingkat keuangan inklusif di delapan Negara di ASEAN dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Perhitungan indeks keuangan inklusif dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Ummah dkk., (2015) dan Atikah dan Ma'ruf (2016).

Variabel independen dari penelitian ini diadopsi dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. GDP Per kapita.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. Terdapat dua cara yang digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita, yaitu berdasarkan harga tetap dan berdasarkan harga yang sedang berlaku. Jika kita menghitung berdasarkan harga tetap maka hasilnya disebut dengan

pendapatan per kapita riil. Sebaliknya apabila kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sedang berlaku maka hasilnya disebut dengan pendapatan perkapita nominal.

Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. GDP Per kapita dianggap penting karena semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa keuangan.

b. Angka Melek Huruf.

Melek huruf (juga disebut dengan melek aksara) adalah kemampuan menulis dan membaca. Lawan kata melek huruf adalah buta huruf atau tuna aksara. Melek huruf juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara.

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll), tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya. Angka melek huruf berkisar antara 0-100, dimana tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk

memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Angka melek huruf merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya diberbagai bidang kehidupan. Selain itu angka melek huruf dapat digunakan sebagai tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf, untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan manusia lainnya serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Melek huruf dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini juga akan memudahkan penerimaan informasi dari berbagai sumber salah satunya adalah lembaga keuangan. Informasi yang diterima akan mudah diolah dan diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan diri. Menurut Migap et al., (2015) bahwa edukasi keuangan akan meningkatkan keuangan inklusif. Dengan demikian melek huruf akan mendukung program keuangan inklusif yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

c. Infrastruktur.

Infrastruktur merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Infrastruktur fisik dan sosial dapat dimaknai sebagai kebutuhan dasar fisik dari sistem struktur yang dipergunakan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur antara lain dapat berupa fasilitas jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal waduk, tanggul, pengolahan limbah, pelistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrasturuktur selain berfungsi sebagai fasilitas juga digunakan dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat, aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat memperlancar dan mempermudah transportasi pengiriman. Baik pengiriman bahan baku ke pabrik maupun distribusi barang ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

1) Jalan Aspal.

Jalan merupakan infrastruktur fisik yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor perhubungan terutama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah. Kondisi jalan yang baik akan menjadi tolak ukur dari perekonomian dan akan memudahkan distribusi barang dan jasa serta kelancaran investasi. Pada umumnya jalan aspal merupakan salah satu infrastruktur yang mengindikasikan kondisi pembangunan yang baik dalam suatu negara. Selain itu, semakin baik kondisi jalan yang ada pada suatu negara akan memudahkan akses pada lembaga keuangan.

## 2) Internet

Menurut Evans (2018) Kemajuan teknologi modern pada zaman sekarang seperti komputer perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, sistem host to host, dan komunikasi data memberikan dampak yang baik kepada jasa perbankan secara elektronik. Hal ini karena dapat meningkatkan akses ke jangkauan yang lebih luas dalam jasa keuangan. Karena hal inilah internet menjadi potensial dalam meningkatkan keuangan inklusif.

Untuk itu dalam penelitian ini infrastruktur yang digunakan adalah jumlah keseluruhan jaringan aspal dan jumlah pengguna internet yang ada di masing-masing negara.

d. Pengangguran.

Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan keuangan inklusif adalah pekerja (Goodwin dalam Sarma dan Pias, 2011). Pekerja adalah faktor penting yang mempengaruhi keuangan inklusif. Pertama, peningkatan lapangan kerja baik formal maupun informal umumnya disertai dengan pertumbuhan pendapatan yang akan mengarah pada partisipasi sistem keuangan formal sehingga meningkatkan keuangan inklusif. Kedua, pekerjaan formal secara otomatis menghubungkan karyawan dengan sistem keuangan formal melalui pembayaran upah dengan *Automated Cash Transfer (ACT)*. Sebaliknya, pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan, akan sedikit kemungkinan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan (Lenka dan Barik, 2018).

7. Kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidakmampuan ini ditandai dengan berbagai macam penyebab seperti rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini akan sangat berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.

Kemiskinan merupakan dimana keadaan seseorang individu atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Dalam arti luas bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) Kemiskinan, (2) Ketidakberdayaan (*powerless*), (3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) Ketergantungan (*dependency*), (5) Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologi. (Chambers, 2010).

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki empat bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

a. Kemiskinan Absolut.

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang di perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai pengeluaran rata-rata untuk kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk dari kemiskinan absolut digunakan sebagai konsep untuk mendefinisikan kriteria masyarakat yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Kultural.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari adanya kebiasaan atau sikap yang berasal dari budaya atau adat istiadat yang tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, boros, masa bodoh dan pasrah kepada nasibnya sendiri.

c. Kemiskinan Relatif.

Kemiskinan Relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

d. Kemiskinan Struktural.

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini terkadang memiliki unsur diskriminatif.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, beberapa literatur tentang keuangan inklusif adalah :

1. Abel et al., (2018) melakukan penelitian yang berjudul "*A Review of Determinants of Financial Inclusion*" yang ada di Zimbabwe. Metode yang digunakan adalah probit. Hasilnya menunjukkan bahwa keuangan inklusif memiliki dampak positif yang signifikan terhadap usia, pendidikan, literasi keuangan, pendapatan dan internet di Zimbabwe.
2. Evans (2018) melakukan penelitian mengenai hubungan internet, telepon dan keuangan inklusif di Africa. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan uji stasioner, uji kointegrasi dan evaluasi efek internet dan telepon seluler terhadap keuangan inklusif di Afrika periode 2000 sampai dengan 2016. Hasil yang diperoleh adalah internet dan telepon memiliki hubungan positif yang signifikan dengan keuangan inklusif di Africa.
3. Chithra dan Selvam (2013) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif di India. Metode yang digunakan adalah Indeks Sarma untuk membangun indeks keuangan inklusif. Hasilnya faktor sosial-economi, pendapatan, literasi dan populasi desa berpengaruh positif signifikan terhadap keuangan inklusif. Faktor perbankan, deposit berpengaruh positif signifikan dan kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap keuangan inklusif. Faktor infrastruktur, jalan, telepon, computer dan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusi. Namun pengangguran, koran, rasio credit-deposit tidak signifikan terhadap Keuangan Inklusi.
4. Atikah dan Ma'ruf (2016) menganalisis mengenai Analisis Keuangan Inklusif: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan

adalah data panel. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih dalam kategori rendah, hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif yang kurang dari 0,3. Hanya di Kota Yogyakarta yang memiliki indeks keuangan inklusi sedang. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka Melek Huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keuangan inklusif. Rasio Jalan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Ummah dkk., (2015) menganalisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooling data). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia yang terus mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah, dengan nilai indeks keuangan inklusif kurang dari 0,3. Ukuran perekonomian dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi positif terhadap keuangan inklusif di Indonesia. Telepon seluler dan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keuangan inklusif di Indonesia.
6. David et al., (2018) melakukan penelitian yang berjudul "*Empirical Analysis of the Determinants of Financial Inclusion in Nigeria : 1990-2016*". Metode yang digunakan dalam penelitian dianalisis dengan *Error Correction Model* (ECM). Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa GDP per

kapita, kredit dan internet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif.

7. Migap et al., (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Financial Inclusion for Inclusive Growth : The Nigerian Perspective*". Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif. Variabel penelitian yang digunakan adalah indeks pertumbuhan inklusif dan indikator keuangan inklusif. Hasil dalam penelitian ini adalah keuangan inklusif diperlukan dalam pertumbuhan inklusif di Nigeria. Internet dan layanan mobile banking meningkatkan keuangan inklusif dan layanan jasa keuangan.
8. Le et al., (2019) menganalisis faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan di ASIA yang menggunakan data dari 20 negara dengan tahun perhitungan 2011-2016. Metode yang digunakan adalah data panel. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keuangan inklusif di ASIA dipengaruhi oleh pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan, tingkat melek huruf berpengaruh positif dan signifikan, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel inflasi, populasi, internet, *interest rate* tidak berpengaruh terhadap keuangan inklusif.
9. Park dan Mercado (2015) melakukan penelitian tentang hubungan keuangan inklusif dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam pembangunan ASIA yang menggunakan data dari 37 negara dengan tahun perhitungan 2011-2016. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, menguji faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi keuangan inklusif di ASIA. Kedua, menguji tingkat keuangan

inklusif dapat mengurangi kemiskinan. Ketiga, menguji tingkat keuangan inklusif dengan ketimpangan pendapatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendapatan per kapita, karakteristik demografi, dan pemerintahan yang baik dan berkualitas mempengaruhi keuangan inklusif. Keuangan inklusif juga mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di ASIA.

10. Zia dan Prasetyo (2018) menganalisis inklusi keuangan terhadap kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia yang menggunakan data 33 provinsi dengan tahun perhitungan 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooling data) dan perhitungan indeks inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat keuangan inklusif di Indonesia masih tergolong sedang, keuangan inklusif berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, dan keuangan inklusif memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

### **C. Hipotesis**

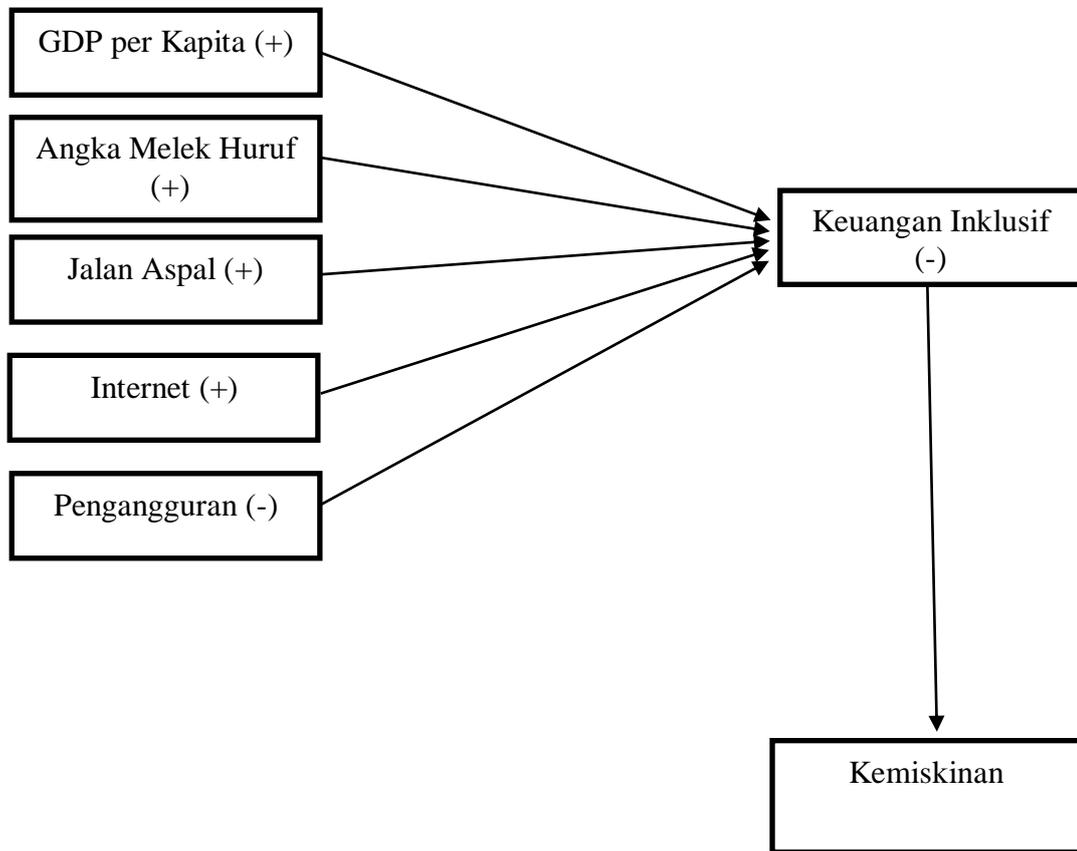
Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga tingkat keuangan inklusif di ASEAN meningkat.
2. Diduga GDP Per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN.
3. Diduga Angka Melek Huruf mempunyai pengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN.

4. Diduga Infrastruktur (Jalan Aspal) mempunyai pengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN.
5. Diduga Infrastruktur (Internet) mempunyai pengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN.
6. Diduga Pengangguran mempunyai pengaruh negatif terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN.
7. Diduga Indeks Inklusi Keuangan mempunyai pengaruh negatif Tingkat Kemiskinan yang ada di ASEAN.

#### **D. Model Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti membuat kerangka pemikiran yang dapat disajikan sebagai landasan dalam penulisan yang mana pada akhirnya dapat diketahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap keuangan inklusif terhadap kemiskinan, maka dari itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



**GAMBAR 2.1.**

Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2.1, penulis ingin mengkaji apakah GDP Per Kapita, Angka Melek Huruf, Infrastruktur (Jalan Aspal dan Internet) dan Pengangguran memiliki pengaruh terhadap keuangan inklusif. Kemudian penulis ingin mengetahui pengaruh keuangan inklusif terhadap kemiskinan. Untuk pengujian ini menggunakan analisis data panel.